Pemilu: Pestanya Rakyat atau Politisi?

Tahun 2014 dianggap sebagai tahun politik, yang ditandai dengan adanya dua perhelatan besar bangsa berupa pemilihan umum untuk anggota legislatif baik pusat maupun daerah dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum biasa disebut pesta demokrasi, karena pada pemilu itulah rakyat berlomba-lomba menentukan pilihan terhadap partai maupun orang atau individu yang dipercaya dapat membawa aspirasi mereka pada ranah legislatif. Harapan yang mulia tersebut patut untuk diperhatikan mengingat dalam iklim demokrasi perwakilan tak memungkinkan rakyat mewakili diri sendiri ikut dalam proses menentukan nasib bangsa dan negara di lembaga legislatif.

Perhelatan besar pemilu ini sedari awal memang akan disinyalir dengan berbagai macam peristiwa yang sesungguhnya berujung pada upaya pemurnian proses demokrasi. Persoalan me-ngenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari waktu ke waktu tetap saja muncul, dan penyelenggara pe-milu (KPU) tampaknya tidak banyak belajar dari masa lalu ataupun jika belajar, tampaknya juga tidak tuntas. Persoalan kedua yang kemungkinan dapat muncul adalah adanya kampanye hitam, baik yang menyerang individu calon anggota legislatif maupun partai politik, atau bahkan invididu tertentu yang sudah terang-terangan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Serangan-serangan yang sedemikian baik untuk pembelajaran pemilu sekaligus cara yang baik untuk belajar ber-argumentasi menjawab berbagai persoalan yang timbul. Inilah perlunya diutamakan rekam jejak, sikap/perilaku, prestasi, kesantunan dan lainnya yang positif bagi calon anggota legislatif agar kampanye hitam tak menyeret mereka ke jalan duka. Jika hal ini diperhatikan sedari awal, tentu tidak ada istilah membeli kucing dalam karung.

Persoalan lain yang kemungkinan muncul adalah masalah politik uang, baik yang dilakukan oleh korporasi terhadap partai politik maupun calon anggota legislatif terhadap konstituennya. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang kedua, di mana calon anggota legislatif seringkali mengguna-kan politik uang untuk "membeli" suara rakyat. Seringkali rakyat disalahkan karena mau menerima uang ataupun sembako dan menjual suaranya. Para politisi dan akademisi selalu saja menyalahkan sikap rakyat ini dengan berdalih pada hukum penawaran dan permintaan serta pendidikan politik yang kurang baik. Tak dapat dipungkiri bahwa hidup rakyat tidak sesejahtera para politisi maupun akademikus, bahkan untuk memberi nafkah keluarga setiap hari mereka memeras keringan mem-banting tulang. Lalu apa yang dilakukan oleh para politisi dan akademikus? Di Senayan maupun di daerah/kota, para politisi berlomba-lomba melakukan korupsi. Janji-janji yang pernah mereka kemukakan pada kampanye yang lalu, berlalu tanpa rasa berdosa. Lalu salahkan jika rakyat kemudi-an menagih janji di depan daripada di belakang ternyata tidak mendapat apa-apa. Inilah politik transaksional yang tidak tuntas, yang berjanji mengkhianati, yang menerima janji merasa diboho-ngi. Oleh karena itu jangan sampai terjadi pemilu kali ini hanya dijadikan ajang politisi untuk meng-gapai kekuasaan, akan tetapi juga ajang bagi rakyat untuk bisa menikmati kue demokrasi yang seharusnya mensejahterakannya. Semoga pemilu kali ini bisa menjadi pestanya rakyat dan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tetapi bukan sekadar janji-janji politik yang sering terbukti kebohongannya.

Purwokerto, Januari 2014
Ketua Penyunting

Agus Raharjo